



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023**

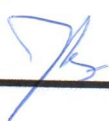


PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO
Jalan SEDUDO

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

Acc
31/ - 22
16 

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sidorejo dibantu Perangkat Desa Sidorejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidorejo .

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo .
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sidorejo
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sidorejo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa
Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala
Desa Tahun 2023

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 7 Oktober 2022

KEPALA DESA SIDOREJO,

SUTRIONO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA SIDOREJO

EGA PRIHANDOKO

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2022 NOMOR 3

f. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

4.4. Matrik RKP Desa Tahun 2023

g. BAB V : PENUTUP

- (3) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo,

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 7 Oktober 2022

KEPALA DESA SIDOREJO,
ttd.

SUTRIONO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,
ttd.

EGA PRIHANDOKO
LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA SIDOREJO,
EGA PRIHANDOKO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	
BAB V PENUTUP.....	V

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SIDOREJO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2019-2025 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sidorejo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sidorejo. serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 1.461.180.870,00,- (Satu Mirlyard Empat Ratus Enam puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000	25.200.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.100.000	4.100.000	
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	899.725.000	899.725.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	44.353.870	44.353.870	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	337.802.000	337.802.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		150.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.311.180.870	1.461.180.870	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sidorejo sebesar Rp. 1.461.180.870,- (Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960	
	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	224.000.000	224.000.000	
	Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	24.000.000	24.000.000	
5.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	44.000.000	44.000.000	
5.2.1	Kegiatan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	
5.2.2	Kegiatan Operasioanal BPD	2.718.000	2.718.000	
	Kegiatan Insentif RT dan RW	32.400.000	32.400.000	
5.3	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.400.000	23.400.000	
5.3.1	Pembangunan Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	30.676.000	30.676.000	
5.3.2	Kegiatan Penyusunan Pendataan dan Pemuthakiran Profil Desa	8.310.000	8.310.000	
	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	6.968.000	6.968.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	13.868.000	13.868.000	

	(RPJMDesa/RKPDesa			
	Kegiatan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa,APBDesa Perubahan ,LPJ	7.800.000	7.800.000	
	Kegiatan Dukungan dan sosialisasasi Pilkades			
	KegiatanForum Pembina Desa	8.125.000	8.125.000	
	Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa			
5.4	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	15.523.000	15.523.000	
02.01	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa			
02.01.01	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ	51.350.000	51.350.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	7.920.000	7.920.000	
5.4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan ,Kls Bumil ,lansia	75.963.000	75.963.000	
5.4.2	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Di bidang Kesehatan	2.851.000	2.851.000	
	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau BKB	3.700.000	3.700.000	
5.5	Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa	4.980.000	4.980.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.578.000	75.578.000	
	Kegiatan Pembangunan Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga	111.290.000	111.290.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	8.298.000	8.298.000	
	Pembangunan /Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata		150.000.000	

	Milik Desa			
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/ketertiban oleh Pemdes	14.250.000	14.250.000	
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9.000.000	9.000.000	
	Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan			
	Penyelenggaraan Festival Kesenian,adat /Kebudayaan Keagamaan(HUT RI,Keagamaan)	2.000.000	2.000.000	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000	3.600.000	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga			
	Pembinaan Karang Taruna	4.700.000	4.700.000	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
	Pembinaan LKMD	2.700.000	2.700.000	
	Pembinaan PKK	12.600.000	12.600.000	
	Pelatihan Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	4.500.000	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Sub bidang Kelautan dan Perikanan	67.250.500	67.250.500	
	Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat milik Desa			
	Sub Bidang Kapasitas Aparatur Desa			
	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	
	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	1.500.000	
	BIDANG PENANGGULANGAN			

	BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK			
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
	Penanggulanagan Bencana	3.000.000	3.000.000	
5.5.2	Sub Bidang Keadaan darurat			
5.5.3	Penanggulangan Keadaan darurat	3.500.000	3.500.000	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
	Penanganan keadaan mendesak	361.900.000	361.900.000	
	JUMLAH BELANJA	1.311.180.870	1.461.180.870	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sidorejo
Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	23.840.208,72	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	0,00	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.000.000	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.000.000	211.117.680
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.200.000	23.180.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	50.500.000	43.481.288,72
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	5.550.000	2.718.360
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000	32.400.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.200.000	23.400.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	22.500.000	9.300.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	80.000.000	30.676.935

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 18 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 75 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	16.815.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.117.680	104.684.100	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.180.000	22.741.713	Tercapai
5.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	43.481.288,72	27.602.800	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	11.750.000	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Operasional BPD	2.718.360	2.718.360	Tercapai
8.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000	27.000.000	Belum Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.400.000	0	Tidak Tercapai
10.				
11.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
12.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	9.300.000	9.300.000	Tercapai
13.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana	30.676.935	8.500.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Kantor Desa (pilih salah satu)			
15.				
16.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
17.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			
18.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.310.000	3.475.000	Belum Tercapai
19.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.725.000	0	Tidak tercapai
20.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
21.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
22.	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
23.				
24.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
25.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			
26.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya			
27.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	13.867.800	11.617.000	Belum Tercapai
28.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	7.773.200	5.397.700	Belum Tercapai
29.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa			
30.	Penyusunan Kebijakan Desa			
31.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	250.000	0	Tidak Tercapai
32.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000	3.179.950	Belum Tercapai
33.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa			
34.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD			
35.	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			
36.	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Perangkat Desa			
37.	Forum Pembina Desa	8.125.000	5.975.000	Belum Tercapai
38.				
39.	Sub Bidang Pertanahan			
40.	Sertifikasi Tanah Kas Desa			
41.	Administrasi Pertanahan			
42.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			
43.	Mediasi Konflik Pertanahan			
44.	Penyuluhan Pertanahan			
45.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.523.855	7.220.500	Belum Tercapai
46.	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)			
47.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai :2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 12 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	66.755.600	51.350.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	7.500.000	7.920.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	65.000.000	75.963.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.000.000	2.851.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	222.000.000	75.578.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	4.000.000	
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.000.000	3.700.000
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad- aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	270.000.000	
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6.000.000	4.980.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	7.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.500.000	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	10.000.000	8.298.000
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	20.000.000	111.290.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	5.000.000	
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	5.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5.000.000	
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 50 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Pendidikan			
2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	51.350.000	28.875.000	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
3.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD			
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat			
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa			
6.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa			
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa			
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**			
9.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			
10	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			
11	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			
12	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan			
13	Sub Bidang Kesehatan			
14	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	7.920.000	4.599.832	Belum tercapai
15	Penyelenggaraan Posyandu	75.963.000	54.212.000	Belum Tercapai
16	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.851.000	2.851.000	Tercapai
17	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.578.000	19.807.000	Belum tercapai
18	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa			
19	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.700.000	2.050.000	Belum tercapai
20	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			
21	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
23	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan			
24	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
25	Pemeliharaan Jalan Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
26	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang			
27	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
28	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			
29	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa			
30	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
31	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			
32	Pemeliharaan Embung Milik Desa			
33	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa			
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa			
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang			
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani			
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa			
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa			
39	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	4.980.000	2.816.920	Belum tercapai
41				
42	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa			
43	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa			
44	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa			
45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa			
46	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
47	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
48	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN			
49	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa			
50	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa			
51	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	8.298.000	8.298.000	Tercapai
52	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
53	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			
54	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
55	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
56	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah			
57	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
58	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan			
59	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa			
60	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	111.290.000	110.745.000	Tercapai
61	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman			
62	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum			
63	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman			
64	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah			
65	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**			
66	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN			
67	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman			
68				
69	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
70	Pengelolaan Hutan Milik Desa			
71	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			
72	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
73	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
74	Sub Bidang Perhubungan, Komun dan Informatika			
75	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			
76	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa			
77	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
78	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*			
79	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
80	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
81				
82	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa			
83	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
84	Sub Bidang Pariwisata			
85	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
86	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
87	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			
88	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.100.000	
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.000.000	14.250.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	7.000.000	9.000.000
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000	2.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.500.000	3.600.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.000.000	4.700.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000	2.700.000
03	Pembinaan PKK	9.000.000	12.600.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	4.500.000
90	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa

Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 80 %. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
2.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			
3.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	14.250.000	8.550.000	Belum Tercapai
4.	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa			
5.	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
6.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	9.000.000	3.000.000	Belum Tercapai
7.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			
8.	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			
9.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
10.				
11.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
12.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			
13.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
14.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	2.000.000	2.000.000	Tercapai
15.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			
17.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	3.600.000	3.000.000	Belum Tercapai
18.				
19.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
20.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			
21.	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa			
22.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			
23.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
24.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
25.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	4.700.000	4.500.000	Belum Tercapai
26.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
27.				
28.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
29.	Pembinaan Lembaga Adat			
30.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.700.000	2.500.000	Belum Tercapai
31.	Pembinaan PKK	12.600.000	11.450.000	Belum Tercapai
32.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	3.750.000	Belum Tercapai
33.	Pembinaan Karang Taruna			
34.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 7 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	20.000.000	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	20.000.000	67.250.000
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	10.000.000	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	600.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000	1.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000	1.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.500.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	2.000.000	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi,		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	10.000.000	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 36,4%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
2.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0	
3.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	67.250.000	62.600.500	Belum Tercapai
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa			
6.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0	
7.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan			
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
9.				
10.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
11.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
12.	Peningkatan Produksi Peternakan			
13.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa			
14.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			
15.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *			
16.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*			
17.				
18.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
19.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tidak Tercapai
20.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	Tidak Tercapai
21.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	1.500.000	Tidak Tercapai
22.				
23.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
24.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	0	
25.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			
26.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0	0	
27.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
28.				
29.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
30.	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0	
31.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi			
32.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
	Pertanian			
33.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
34.				
35.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
36.	Pembentukan BUM Desa			
37.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			
38.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	
39.				
40.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
41.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa			
42.	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0	
43.	Pengembangan Industri kecil level Desa			
44.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
45.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	3.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000	3.500.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	70.000.000	361.900.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000	0	Tidak Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	3.500.000	0	Tidak Tercapai
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	361.900.000	271.900.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai :0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul

pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sidorejo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Ketidaksamaan rancangan awal di RKPDesa dan anggaran APBDesa
2. Belum ada Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2023
3. Masih Kurangnya Jumlah Perangkat Desa
4. Sarana Prasarana kurang

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Survey Harga material tidak sesuai dengan RAB
2. Pencairan Dana Di saat Musim Penghujan dan cuaca yang tidak Stabil

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pelaksanaan Kegiatan Belum lancar

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Hasil Peningkatan Kapasitas masyarakat atau lembaga belum optimal

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Pergantian KPM BLT-DD memerlukan waktu untuk Mengidentifikasi

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sidorejo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:

- 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
- 3) RKP Desa Tahun 2024
- 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
- 5) Kegiatan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kades dan Parades
- 6) Kegiatan Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa
- 7) Kegiatan Operasional PEMDES
- 8) Kegiatan SILTAP BPD
- 9) Kegiatan Operasional BPD
- 10) Insentif Operasioanal RT & RW
- 11) Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa
- 12) Kegiatan Sarana & Prasarana Kantor Desa
- 13) Kegiatan Profil Desa
- 14) Kegiatan Pemetaan dan Analisis Keniskinan Secara Parsitipatif
- 15) Kegiatan Perencanaan Desa
- 16) Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDES, PAPBDES dan Pertanggungjawaban APBDES

- 13) Kegiatan Profil Desa
- 14) Kegiatan Pemetaan dan Analisis Keniskinan Secara Parsitipatif
- 15) Kegiatan Perencanaan Desa
- 16) Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDES,PAPBDES dan Pertanggungjawaban APBDES

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
- 2) Pembangunan /Peningkatan Sarana Prasarana PAUD
- 3) Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan
- 4) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 5) Kegiatan POSKESDES/POLINDES
- 6) Kegiatan POSYANDU
- 7) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 8) Penyelenggaraan Desa Siaga
- 9) Pengasuhan Bersama/Bina BKB
- 10) Pemeliharaan Sarana Prasarana POSYANDU/POLINDES
- 11) Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman umum
- 12) Kegiatan Normalisasi Irigasi
- 13) Pembangunan Pavingisasi Jalan Banjarsari RT 01s/d RT 04 RW 01
- 14) Pembangunan MCK GAKIN
- 15) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 16) Pembangunan dan Pengelolaan Sampah
- 17) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1) membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 2) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 3) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
- 4) Pelatihan kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - 6) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
 - 7) Kegiatan Peringatan PHBN/Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan Dan Keagamaan Tingkat Desa
 - 8) Kegiatan Inovatif Di Bidang Keagamaan
 - 9) Kegiatan Pembinaan LPM/LMD
 - 10) Kegiatan Pembinaan PKK
 - 11) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
 - 12) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
 - 13) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) pengembangan seni budaya lokal;
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - 4) Peningkatan Kapasitas BPD
 - 5) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel(Penyandang Disabilitas)
 - 6) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga; kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - 7) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - 8) pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - 9) Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
KPMD, Kelompok UEP, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi, kelompok pengrajin.
 - 10) Penambahan Modal BUMDES
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. EDABU

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023 (Form Excel)

DESA	:	SIDOREJO
KECAMATAN	:	SAWAHAN
KABUPATEN	:	NGANJUK
PROVINSI	:	JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Kewilayatan	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1 org	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	34.000.000	ADD	✓				
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		9 org	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	240.000.000	ADD	✓				
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		11 org	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	23.200.000	ADD	✓				
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	50.500.000	BHPRD/PAD	✓				
			5	Penyediaan Tunjangan BPD		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	BPD	14.100.000	ADD	✓				
			6	Penyediaan Operasional BPD		5 org	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	BPD	5.530.000	ADD	✓				
			7	Penyediaan Insentif RT/RW		27 org	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	RT/RW	32.400.000	ADD	✓				
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa		9 org	2023	Desa Sidorejo	12 Bln	PEMDES	25.200.000	PAD	✓				
			2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	3 Paket	PEMDES	22.500.000	DD	✓	
2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	5.000.000	PHBRD	✓				
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	25.000.000	BK/PHBRD	✓				
			1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	1.500.000	DD	✓				
			2	a. Pemutakhiran Profil Desa		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	4.000.000	DD	✓				
				b. Pemutakhiran SDGs		1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	10.000.000	DD	✓				
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa													
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		1,2,5,10	1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	PEMDES	12.500.000	DD	✓			
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan													
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																

[illegible]

[illegible]

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
6	Dukungan Penanaman Modal	90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
		1 Pembentukan BUM Desa												
		2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa												
	Perdagangan dan Perindustrian	90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√		
		1 Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa												
		2 Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa	1,3,4,5, 8,9,10, 12	1 Paket	1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	25.000.000	DD/ BK	√		
7	Perdagangan dan Perindustrian	3 Pengembangan Industri kecil level Desa												
		4 Pembentukan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Peningkatan kelompok usaha ekonomi												
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian												
										71.100.000				
5	Jumlah Bidang 4													
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1 Penanggulangan Bencana	4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√		
		2 Keadaan Darurat	4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	5.000.000	DD	√		
		3 Keadaan Mendesak	4,5,9,15	1 Paket	1 Paket	2023	Desa Sidorejo	1 Paket	Masy	37.600.000	DD	√		
	Jumlah Bidang 5													
JUMLAH TOTAL										1.461.180.000				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA SIDOREJO,
SUTRIONO